

**SIKAP PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP KEBIJAKAN  
POLITIK SOEKARNO 1957-1962 M**



**SKRIPSI**

Diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
UIN Sunan Kalijaga untuk Memenuhi Syarat  
guna Memperoleh Gelar Sarjana Humaniora (S.Hum)

Oleh:

**Fitra Fadhli Prilana**

NIM : 12120007

**JURUSAN SEJARAH DAN KEBUDAYAAN ISLAM  
FAKULTAS ADAB DAN ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2018**

## ABSTRAK

Prawoto Mangkusasmito dikenal sebagai salah seorang pemimpin, negarawan, dan ketua terakhir partai Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi). Karir politik Prawoto mencapai puncaknya ketika ia diangkat menjadi Wakil Perdana Menteri dalam Kabinet Wilopo-Prawoto (2 April-31 Juli 1953) dan menjadi ketua umum terakhir partai Masyumi tahun 1959. Selama menjabat sebagai ketua, Prawoto dihadapkan dua kebijakan besar politik yang diputuskan oleh Soekarno, Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran partai Masyumi. Berdasarkan fakta sejarah tersebut, penulis perlu membahas lebih dalam mengenai latar belakang kebijakan politik Soekarno dan sikap yang diambil oleh Prawoto atas kebijakan politik Soekarno. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan tentang sikap yang diambil Prawoto atas kebijakan politik Soekarno dengan beberapa faktor yang mempengaruhinya.

Penelitian ini merupakan penelitian sejarah dengan pendekatan politik. Teori yang digunakan adalah teori *challenge and response* yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee yang berpendapat bahwa ketika individu atau kelompok mampu merespon tantangan-tantangan kehidupan dan menyesuaikan diri atau mengendalikan tantangan, maka individu atau kelompok tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Tetapi sebaliknya jika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan merespon (mengendalikan) tantangan, maka individu atau kelompok ini akan mengalami kemunduran bahkan mengalami kehancuran. Data dikumpulkan melalui studi pustaka dengan penelusuran buku yang berkaitan. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang meliputi empat hal: heuristik (pengumpulan data), verifikasi (kritik sumber), interpretasi (penafsiran), dan historiografi (penulisan sejarah).

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Prawoto Mangkusasmito mengambil sikap menolak atas dua kebijakan politik Soekarno. Menurut Prawoto Dekrit Presiden Soekarno akan memunculkan “maha pemimpin” dan menempatkan pemimpin itu di atas hukum dengan sentralisasi kekuasaan yang berujung pada *mach-staat*. Akibat penolakan Prawoto terhadap Dekrit, Soekarno mengirim surat perintah pembubaran partai Masyumi yang diketuai Prawoto. Mengenai pembubaran Masyumi, Prawoto memenuhi keputusan Soekarno untuk menghindari status Masyumi sebagai partai terlarang. Selanjutnya ia memperjuangkan hak Masyumi melalui jalur hukum namun gagal. Akhirnya Prawoto dijebloskan ke penjara oleh Soekarno pada tahun 1962.

**Kata Kunci:** Prawoto Mangkusasmito, Soekarno, Masyumi.

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fitra Fadhli Prilana

NIM : 12120007

Jenjang/ Jurusan : S1/ Sejarah dan Kebudayaan Islam

menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yogyakarta, 31 Januari 2018  
Saya yang menyatakan,



**Fitra Fadhli Prilana**  
NIM : 12120007

## NOTA DINAS

Kepada Yth.,  
**Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya**  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

**SIKAP PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP KEBIJAKAN  
POLITIK SUKARNO 1957-1962 M**

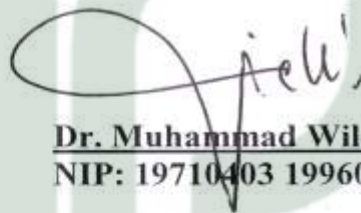
yang ditulis oleh :

Nama : Fitra Fadhli Prilana  
NIM : 12120007  
Jurusan : Sejarah dan Kebudayaan Islam

saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Adab dan Ilmu Budaya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk diujikan dalam sidang munaqasyah.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*

Yogyakarta, 31 Januari 2018  
Dosen Pembimbing



**Dr. Muhammad Wildan, M.A.**  
NIP: 19710403 199603 1 001



## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/\_\_\_\_/PP.00.9/\_\_\_\_/2018

Tugas Akhir dengan judul : SIKAP PRAWOTO MANGKUSAMITO TERHADAP KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO 1957-1962 M

yang diperstapkan dan disusun oleh:

Nama : FITRA FADHLI PRILANA  
Nomor Induk Mahasiswa : 12120007  
Telah diujikan pada : Kamis, 22 Februari 2018  
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. Muhammad Wildan, M.A.  
NIP. 19710403 199603 1 001

Penguji I

Prof. Dr. H. Dudung Abdurrahman, M.Hum.  
NIP. 19630306 198903 1 010

Penguji II

Herawati, S.Ag., M.Pd.  
NIP. 19720424 199903 2 003

Yogyakarta, 22 Februari 2018

UIN Sunan Kalijaga  
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya  
DEKATAN



Prof. Dr. H. Alwan Khoiri, M.A.  
NIP. 19600224 198803 1 001

## **MOTTO**

Dalam masyarakat yang bebas dan terbuka,  
kerahasiaan adalah hal yang menjijikan!



## **PERSEMBAHAN**

Untuk-ku, orang tua, serta almamater jurusan Sejarah dan Kebudayaan  
Islam UIN Sunan Kalijaga.



## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء

والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

Puji syukur kehadiran Allah swt. Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis berhasil menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Saw, manusia pilihan pembawa rahmat dan pemberi syafa'at di hari kiamat.

Skripsi yang berjudul “Sikap Prawoto Mangkusasmito Terhadap Kebijakan Politik Soekarno 1957-1962 M” ini merupakan karya penulis yang proses penyelesaiannya tidak semudah yang dibayangkan. Oleh karena itu, penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak semata-mata usaha dari penulis, melainkan atas bantuan dari berbagai pihak. Dalam hal ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Ibuku Efi Pristiani, ayahku Tuhirin, dan adikku Ratisa Adhani, mereka yang paling pantas mendapatkan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala upaya dalam mencurahkan jiwa dan raganya untuk tetap setia mendoakan dan mendukung penulis untuk menuntut ilmu hingga saat ini.

2. Dr. Muhammad Wildan, M. A., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu, pikiran, tenaga untuk membimbing dengan cermat, dan sabar dalam memberikan masukan, saran, serta kritik yang sangat bermanfaat bagi penulis.
3. Prof. Dr. Mundzirin Yusuf, M. Si, selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama masa kuliah.
4. Dekan Fakultas Adab dan Ilmu Budaya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staff.
5. Ketua Jurusan Sejarah dan Kebudayaan Islam beserta jajarannya, serta seluruh dosen yang telah terlibat selama proses pembelajaran dan memperkaya pemahaman di dalamnya.
6. Kawan-kawan Sejarah dan Kebudayaan Islam angkatan 2012 yang sudah lulus, akan lulus, dan yang terpaksa mundur.
7. Kawan-kawan Wisma Darussalam Memberontak, Kamituo Squad, Sekilas Sejarah, Sliver Grunge Propaganda, Samingun Brotherhood, Serikat Blank Indonesia, dan Diyan Ayu Apriliani yang membuka mata penulis bahwa ada hal yang lebih penting dari pada *Second God* (uang).
8. Kawan-kawan Keluarga Mahasiswa Banjarnegara UIN SUKA (KEMBARA) dan Keluarga MAN Model Jambi Yogyakarta (KAMANJAYO).
9. Pihak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Atas bantuan dan dukungan dari berbagai pihak di atas, penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Semoga semua pihak yang terkait dalam penyusunan skripsi ini senantiasa mendapatkan balasan yang setimpal dari sisi Allah swt.

Penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca pada umumnya. Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu, kritik, dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Yogyakarta, 31 Januari 2018

Penulis,

Fitra Fadhli Prilana

NIM: 12120007

## DAFTAR ISI

|                                                                                            |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                        | i         |
| HALAMAN ABSTRAK .....                                                                      | ii        |
| HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN .....                                                          | iii       |
| HALAMAN NOTA DINAS .....                                                                   | iv        |
| HALAMAN PENGESAHAN .....                                                                   | v         |
| HALAMAN MOTTO .....                                                                        | vi        |
| HALAMAN PERSEMBAHAN .....                                                                  | vii       |
| KATA PENGANTAR .....                                                                       | x         |
| DAFTAR ISI .....                                                                           | x         |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>BAB I : PENDAHULUAN .....</b>                                                           | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang Masalah .....                                                            | 1         |
| B. Batasan dan Rumusan Masalah .....                                                       | 7         |
| C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....                                                    | 8         |
| D. Tinjauan Pustaka .....                                                                  | 9         |
| E. Landasan Teori .....                                                                    | 12        |
| F. Metode Penelitian .....                                                                 | 15        |
| G. Sistematika Pembahasan .....                                                            | 18        |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>BAB II : BIOGRAFI PRAWOTO MANGKUSASMITO .....</b>                                       | <b>20</b> |
| A. Latar Belakang Keluarga .....                                                           | 20        |
| B. Latar Belakang Pendidikan .....                                                         | 23        |
| C. Karir Politik Prawoto Mangkusasmito .....                                               | 26        |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>BAB III : KEBIJAKAN POLITIK SOEKARNO TAHUN 1957-1962 .....</b>                          | <b>34</b> |
| A. Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....                                                       | 34        |
| B. Pembubaran Partai Masyumi .....                                                         | 45        |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>BAB IV : REAKSI PRAWOTO MANGKUSASMITO TERHADAP<br/>KEPUTUSAN POLITIK SOEKARNO .....</b> | <b>51</b> |
| A. Sikap Prawoto Terhadap Dekrit Presiden 5 Juli 1959 .....                                | 51        |
| B. Sikap Prawoto Terhadap Pembubaran Partai Masyumi .....                                  | 58        |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>BAB V : PENUTUP .....</b>                                                               | <b>70</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                        | 70        |
| B. Saran .....                                                                             | 71        |
| <br>                                                                                       |           |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>                                                                | <b>72</b> |
| <b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>                                                          | <b>76</b> |

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 bukan berarti Indonesia sudah bebas dari berbagai ancaman. Mulai dari Agresi Militer I dan II, lalu berdirinya berbagai gerakan separatis, serta negara boneka buatan Belanda (Negara Sumatra Timur dan Negara Indonesia Timur). Model pendekatan Republik Indonesia Serikat (RIS) digunakan pemerintah dengan undang-undang darurat yang memberikan peluang penggabungan antar negara negara boneka dan resmi. Melalui konsep “Mosi Integral”, sebuah mosi yang berisikan kesediaan seluruh negara bagian RIS, Negara Boneka, serta Negara Republik Indonesia bersama-sama membubarkan diri dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah pimpinan presiden Soekarno.<sup>1</sup>

Perkembangan terpenting dan peralihan sistem politik Indonesia pasca kemerdekaan terjadi pada tahun 1950. RIS diubah dalam bentuk kesatuan baru, yaitu sistem parlementer yang kemudian dipimpin Perdana Menteri Natsir. Penunjukan Natsir sebagai Perdana Menteri merupakan hasil kesepakatan koalisi kabinet saat itu. Tercatat banyak pergantian Perdana Menteri, dari Hatta, Susanto, Abdul Halim, Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastroamidjoyo, Burhanuddin

---

<sup>1</sup>Ahmad Masur Suryanegara, *Api Sejarah II* (Bandung: PT. Grafindo Media Pratama, 2010), hlm. 315.

Harrahap, dan Juanda Kartawijaya.<sup>2</sup> Gagasan tersebut menandakan demokrasi pada periode awal kemerdekaan, kemudian dikenal dengan istilah Demokrasi Parlementer.

Persoalan dukung-mendukung dan anti terhadap sebuah kepemimpinan tidak hanya terjadi di masa sekarang saja, tetapi pada zaman Soekarno juga. Pada zaman Soekarno atau Orde Lama ada tiga kubu besar yaitu Nasionalis, Komunis, dan Islam. Para penganut aliran Marxis memiliki korpus ideologi yang baku, bahkan mereka yang memilih garis haluan Moscow mendapat pedoman instruksi yang jelas. Para partisan nasionalisme sekuler memiliki panutan pada pribadi Soekarno. Sementara kaum Islam semenjak keluarnya SI dan NU dari Masyumi tidak memiliki doktrin yang sedemikian jelas dan baku maupun pemimpin yang tak terbantahkan.<sup>3</sup> Golongan Nasionalis dan Komunis dimotori oleh Partai Nasional Indonesia (PNI) dan Partai Komunis Indonesia (PKI) yang selalu mendukung Soekarno, sedangkan kelompok Islam terpecah menjadi dua suara.<sup>4</sup> Kelompok Islam yang mendukung kekuasaan Soekarno ialah Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Nahdlatul Ulama (NU), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah (PERTI), sedangkan yang menentang adalah Masyumi.

Zaman Orde Lama partai Islam (Masyumi) yang tidak mendukung pemerintahan Soekarno mengambil sikap sebagai pihak oposisi, dikarenakan Soekarno melibatkan PKI di berbagai institusi pemerintahan. Masyumi tidak

---

<sup>2</sup>Dede Rosyada, dkk., *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kerjasama The Asia Foundation & Perdana Media, 2003), hlm. 131.

<sup>3</sup>Remy Madinier, *Partai Masyumi* (Jakarta: Mizan, 2013), hlm. 109.

<sup>4</sup>Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965* (Jakarta: Grafiti Pers, 1987), hlm. 117.

menghendaki “campur tangan” PKI di Indonesia karena perbedaan ideologi dan trauma sejarah akibat peristiwa pemberontakan Madiun 1948. Pemberontakan itu memakan korban kurang lebih 8000 orang.<sup>5</sup> Pemberontakan itu menciptakan tradisi permusuhan antara PKI melawan tentara, dan santri.

Perseteruan antara oposisi dan pemerintah mencapai puncaknya ketika pidato Soekarno dengan judul *Respublika Sekali Lagi Respublika* pada sidang pleno konstituante di Bandung 22 April 1959. Pidato itu menyerang konstituante karena mempraktikkan cara-cara demokrasi liberal, sambil menawarkan solusi mengembalikan demokrasi Indonesia pada bentuk Demokrasi Terpimpin. Menurut Soekarno, Demokrasi Terpimpin adalah bentuk relevan untuk Indonesia, bukan sebagai kamuflase kediktatoran serta sentralisme seperti paham Komunis, dan berbeda pula dengan demokrasi liberal. Pondasinya sesuai pembukaan UUD 1945, “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan”, seperti rapat suku yang dipimpin ketua adat, jadi tidak sekedar dalam bidang politik, melainkan dalam sosial, dan ekonomi.<sup>6</sup>

Wacana tentang Demokrasi Terpimpin bukanlah sesuatu yang baru muncul ketika dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959, akan tetapi wacana tersebut sudah terlintas dalam diri Soekarno bertahun-tahun sebelum diterapkannya Demokrasi Terpimpin tersebut.<sup>7</sup> Soekarno menganggap Demokrasi Parlementer yang dipakai bangsa Indonesia merupakan produk impor yang tidak sesuai dengan

---

<sup>5</sup>Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 346.

<sup>6</sup>M. Amin Rais, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986), hlm. 82.

<sup>7</sup>Soegiarso Soerojo, *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno* (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), hlm. 127. Hal yang sama juga pernah disampaikan Soekarno dalam pidatonya tanggal 21 Februari 1957.

keadaan sosial masyarakat kita, demokrasi tersebut tidak menjiwai cita-cita bangsa Indonesia.

Kebijakan Soekarno mengenai penerapan Demokrasi Terpimpin mendapat tentangan banyak kalangan, seperti penolakan yang dilontarkan ketua terakhir Masyumi, Prawoto Mangkusasmito. Menurut Prawoto, “Dekrit Presiden justru menunjukkan ditinggalkannya Trias Politika, yang berarti bukan untuk kembali ke UUD 1945”. Penetapan-penetapan presiden yang berlaku menurutnya sudah melampaui batas-batas pengertian *staatsnood* (kondisi negara dalam keadaan darurat) baik subjektif maupun objektif. Dampaknya orang akan bertanya-tanya apakah kita masih berevolusi pada saat ini. Soekarno memaksa masyarakat memahami Demokrasi Terpimpin sebagai pilihan terbaik dari sistem sebelumnya. Namun, penerapannya bertentangan dengan ide-ide dari proklamasi sistem tersebut, karena nilai demokrasi “dicederai” dengan ide penetapan Soekarno menjadi presiden seumur hidup.<sup>8</sup>

Keputusan politik berskala nasional di masa lampau, khususnya masa Revolusi Kemerdekaan, Demokrasi Parlementer, dan Demokrasi Terpimpin tidak bisa disangkal merupakan hasil kerja orang-orang partai. Ketika menyebut partai, mustahil bagi kita menutup mata terhadap peran partai Islam Masyumi, dengan Prawoto sebagai ketua umum tersingkat dari tahun 1959-1960. Prawoto menjadi nahkoda terakhir partai Masyumi setelah kongres IX partai tersebut di Yogyakarta pada tahun 1959.

---

<sup>8</sup>Zulfikar, Ghazali dkk, *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998), hlm. 23.

Prawoto adalah kader pergerakan yang dilahirkan dari *Jong Islamietend Bond* (JIB), Muhammadiyah, dan *Studenten Islam Studi* (SIS).<sup>9</sup> Saat ikut terlibat mendirikan partai Masyumi bersama Ki Bagus Hadikusumo, mereka berdua adalah wakil dari Muhammadiyah.<sup>10</sup> Masyumi adalah partai yang membawa nama Prawoto terdengar tidak asing di telinga rakyat Indonesia. Prawoto bersama Mohammad Natsir dan sebagian tokoh Masyumi mendirikan Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII) tahun 1967, setelah tidak memenangkan gugatan terkait pembubaran partai Masyumi.<sup>11</sup>

Dalam politik pemerintahan, Prawoto mulai aktif menjadi anggota Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) 1946-1949, dan di zaman RIS (1949-1950) Prawoto diangkat menjadi ketua. Selama masa Revolusi Nasional, Prawoto ikut bergerilya dan jadi anggota komisariat Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Jawa. Tahun 1950 diutus menjadi penasehat delegasi Indonesia ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dengan lahirnya Negara Kesatuan, ia menjadi anggota DPRS-RI, dan memimpin fraksi Masyumi. Dalam kabinet Wilopo (1952-1953) Prawoto menjabat sebagai Wakil Perdana Menteri.

Dalam bidang pendidikan Prawoto menjadi salah satu tokoh kurator pendiri Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN), cikal bakal dari IAIN dan UIN sekarang.<sup>12</sup> Prawoto merupakan sosok negarawan yang memiliki jasa besar terhadap proses penataan negara yang baru “seumur jagung”.

---

<sup>9</sup>Artawijaya, *Belajar dari Partai Masjumi* (Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2014), hlm. 17.

<sup>10</sup>*Ibid.*, hlm. 18.

<sup>11</sup>*Ibid.*

<sup>12</sup>S. U. Bajasut, *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasminto* (Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014), hlm. Xi.

Dunia politik adalah dunia yang bergumul dengan kepentingan kekuasaan. Setiap individu atau kelompok yang telah mengikrarkan dirinya terjun ke dunia politik mustahil tidak mengemban misi untuk merengkuh kekuasaan. Banyak cara yang ditempuh untuk meraih kekuasaan atau mempertahankannya, dari mulai membangun hubungan koalisi sampai melenyapkan lawan yang dianggap membahayakan.

Menurut kacamata politikus, penilaian antara mitra dan musuh begitu samar, karena segala sesuatunya baru bisa dilihat jelas atas dasar kepentingan. Sebuah ungkapan anonim berbunyi “dalam politik tidak ada kawan abadi atau musuh abadi tetapi yang ada hanyalah kepentingan abadi”. Hal itu pula yang tercermin dalam hubungan politik antara Prawoto dengan Soekarno.

Prawoto dalam tulisannya mengungkapkan bahwa definisi mengenai Demokrasi Terpimpin yang diterangkan oleh pemerintah tidak meyakinkan. Menurut Prawoto, Demokrasi Terpimpin akan memunculkan seorang “maha pemimpin” dan “seorang pemangku kekuasaan yang menempatkan dirinya di atas hukum”. Status seorang “maha pemimpin” sangat berbahaya karena punya kecenderungan bertindak di luar sistem dan berpotensi melawan hukum itu sendiri.<sup>13</sup> Tegas Prawoto yang dikenal teguh dalam menolak model pemerintahan absolut dalam suatu negara.

Prawoto dikenal sebagai orang yang bersahabat dengan tokoh agama lain dan sebagai politikus yang tidak menggunakan politik untuk mencari uang. Hal itu

---

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm. 95.

dibuktikan dengan apa yang dipaparkan Harry Tjan Silalahi, ketua Partai Katolik Indonesia pada 1971. Ia pernah bertanya kepada I. J. Kasimo (Pendiri Partai Katolik Indonesia), mengapa Partai Katolik Indonesia dekat dengan Masyumi? “Karena tokoh-tokoh Masyumi, khususnya Prawoto memiliki integritas”, kata Kasimo.<sup>14</sup> Walau banyak tawaran menjadi komisaris perusahaan, Prawoto lebih memilih hidup sederhana dengan tidak memanfaatkan jabatan besar yang ia ampu.

Pembahasan mengenai Prawoto merupakan suatu hal yang unik. Sebagai ketua terakhir Masyumi, Prawoto harus mengemban beban atas keputusan kawan partainya di Pemerintahan Revolusioner Republik Indonesia (PRRI) yang tidak merasa puas dengan kepemimpinan Soekarno, walau akhirnya Prawoto bertemu kembali kawan-kawannya di penjara. Berangkat dari masalah tersebut, penulis mencoba menganalisis bagaimana sikap Prawoto Mangkusasmito terhadap kebijakan politik Soekarno 1957-1962.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penulisan ini bermaksud untuk mendeskripsikan sikap Prawoto terhadap kebijakan politik Soekarno. Agar proses pendeskripsian ini terarah, penelitian difokuskan pada kebijakan politik Soekarno mengenai Dekrit Presiden 1959, dan pembubaran partai Masyumi. Dalam skripsi ini Prawoto ditempatkan sebagai objek sentral.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

Penulisan ini dibatasi antara tahun 1957-1962. Tahun 1957 menjadi titik awal penelitian karena pada Februari 1957 Soekarno mengeluarkan gagasan yang disebut dengan Konsepsi Presiden.<sup>15</sup> Tahun 1962 dijadikan batas akhir penulisan dikarenakan Prawoto dijebloskan ke penjara oleh kekuasaan Orde Lama. Untuk memprakarsai objek kajian ini, maka diperlukan rumusan masalah yang termanifestasikan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito?
2. Bagaimana kebijakan politik Soekarno pada masa 1957-1962 M?
3. Mengapa Prawoto Mangkusasmito bereaksi terhadap kebijakan politik Soekarno?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan sebagai seorang yang bergiat dalam studi sejarah. Secara umum tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjelaskan sikap Prawoto. Secara khusus penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan yang telah disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu:

1. Mendeskripsikan kebijakan politik Soekarno mengenai Dekrit Presiden 1959 dan pembubaran partai Masyumi.
2. Menganalisis sikap Prawoto terhadap kebijakan politik yang ditetapkan oleh Soekarno.

---

<sup>15</sup>Konsepsi Presiden adalah judul pidato yang dibacakan oleh Soekarno pada siaran RRI Jakarta, pukul 20.05 WIB, 21 Februari 1957. Pidato tersebut berisi tentang pendapat Soekarno mengenai penerapan sistem Demokrasi Parlementer secara Barat yang dianggap tidak cocok dengan kepribadian bangsa Indonesia. Wawan Tunggal, *Demokrasi Terpimpin, Milik Rakyat Indonesia, Kumpulan Pidato Soekarno* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), hlm. 31.

Sedangkan kegunaannya ialah:

1. Menambah khazanah keilmuan tentang pro-kontra kebijakan politik Soekarno mengenai Dekrit Presiden 1959 dan pembubaran partai Masyumi.
2. Meneladani tokoh perjuangan dalam rangka memperkuat jati diri bangsa, menanamkan rasa cinta Islam, dan tanah air.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Problematika kehidupan tidak berdiri sendiri tanpa adanya interdependensi dengan aspek kehidupan yang lain, begitu pula dalam suatu penelitian, pastilah ada keterkaitan antara suatu tema kajian dengan kajian yang lain. Oleh sebab itu penulis melakukan penelusuran terhadap beberapa referensi yang berhubungan dengan tema yang diangkat supaya mempunyai relevansi terhadap topik yang diteliti. Dalam penelusuran literatur-literatur tersebut, penyusun menemukan referensi yang membantu mengungkap tentang penelitian ini. Ada pun referensi yang telah ditemukan di antaranya sebagai berikut:

Pertama, buku karya S. U. Bajasut, dengan editor Lukman Hakiem, terbitan Kompas Gramedia di tahun 2014 dengan judul *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Ketua Umum (terakhir) Partai Masyumi*. Buku ini mengandung kompilasi dari tulisan, ceramah, dan wawancara yang pernah disampaikan Prawoto Mangkusasmito dalam sejumlah kegiatan, peristiwa, atau untuk merespon dinamika sosial, politik, budaya, dan hukum yang berkembang pada akhir tahun 1940-an hingga tahun 1970-an. Persamaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu di buku ini terdapat berbagai tema

pidato Prawoto yang membahas kebijakan Dekrit 5 Juli 1959 dan pembubaran Masyumi. Sedangkan perbedaan penelitian yang dilakukan penulis dengan buku ini yaitu penelitian ini menjabarkan sebab-akibat munculnya pendapat Prawoto dan Soekarno mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran Masyumi yang sebelumnya tidak dibahas di dalam buku ini.

Buku kedua adalah *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, dan Ahmad Subarjo* yang ditulis oleh Zulfikar Ghazali dkk, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Buku ini menguraikan tentang pemikiran tiga tokoh kebangsaan tersebut dengan menguraikan latar kehidupannya, pengaruh dan tantangan yang mereka hadapi. Persamaan buku ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama bertujuan mengungkap pemikiran Prawoto mengenai solusi yang harus diambil oleh negara ketika mengalami gejolak dalam kubu pemerintahan. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembahasan mengenai interaksi politik antara Soekarno dan Prawoto yang tidak banyak dibahas oleh buku ini kemudian ditekankan oleh penulis dalam penelitian ini.

Buku ketiga adalah *Partai Masyumi, Antara Godaan Demokrasi & Islam Integral*, karangan Remy Madinier, terbit dalam bahasa Prancis tahun 2011, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh Mizan tahun 2013. Buku ini memaparkan sumbangan Masyumi terhadap sejarah Islam Indonesia khususnya dalam bidang politik. Persamaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai pembubaran Masyumi. Perbedaan

buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembahasan dalam buku ini fokus pada peran partai Masyumi sebagai wadah perjuangan umat Islam yang berupaya memadukan antara Islam dan demokrasi, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis fokus terhadap pembahasan kepemimpinan ketua terakhir Masyumi (Prawoto) dalam menghadapi kebijakan politik Soekarno mengenai Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran Masyumi sebagai partai..

Buku keempat adalah *Partai Masyumi Dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia* yang ditulis oleh Insan Fahmi Siregar, diterbitkan oleh Widya Karya di Semarang pada tahun 2012. Buku ini membahas mengenai dinamika partai dengan para pemimpin-pemimpinya dalam nuansa demokrasi Orde Lama. Persamaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas mengenai dinamika pemimpin Masyumi dengan Soekarno yang berimbas pada pembubaran Masyumi sebagai partai. Perbedaan buku ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pembahasan dinamika Masyumi ketika dipimpin Prawoto ditekankan oleh penulis dalam penelitian, sedangkan buku ini lebih menonjolkan peran Natsir dalam Masyumi.

Dari empat buku di atas, penulis menemukan banyak hal pembahasan mengenai Masyumi dan Soekarno, namun pembahasan tentang sikap Prawoto terhadap kebijakan politik Soekarno pada tahun 1957-1962 mengenai Dekrit Presiden 1959 dan pembubaran partai Masyumi lebih menjadi perhatian penulis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan memiliki kekhususan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Selain adanya perbedaan topik, juga memberi sudut pandang yang bersebrangan terhadap kebijakan politik Soekarno.

## E. Landasan Teori

Partai yang diketuai Prawoto secara ideologi merupakan partai yang memperjuangkan cita-cita politik Islam di Indonesia. Dalam perjalanannya partai Masyumi mendapat penolakan dari Soekarno atas ideologi yang mereka pilih. Penolakan Soekarno mengharuskannya mengambil kebijakan-kebijakan yang bisa menghentikan laju Masyumi di dunia perpolitikan Indonesia. Puncak penolakan tersebut datang ketika Prawoto menjabat sebagai ketua partai Masyumi. Sewaktu dipimpin Prawoto, Masyumi dibubarkan oleh Soekarno. Kebijakan yang diambil Soekarno membuat Prawoto harus menentukan sikap tegas atas lawan politik partai yang dipimpinnya.

Demi mendapatkan gambaran yang komprehensif terhadap sikap yang diambil oleh Prawoto, penulis menggunakan pendekatan politik. Pengertian politik mempunyai banyak definisi, para ahli mempunyai perbedaan karena tinjauan aspek dan sudut pandang yang berbeda tentang politik, persamaannya terletak pada unsur-unsur dalam politik. Unsur-unsur politik terdiri dari negara (*state*), kekuasaan (*power*), pengambilan keputusan kebijaksanaan (*policy, beleid*), dan pembagian (*distribution*) atau alokasi (*allocation*).<sup>16</sup> Hematnya, politik adalah kegiatan yang berhubungan dengan negara dan pemerintahan.

Bila membuka karya-karya sejarah konvensional, dapat dikatakan bahwa sejarah itu identik dengan politik. Alasannya, karena melalui karya-karya seperti itu banyak diperoleh pengetahuan tentang jalannya sejarah yang ditentukan oleh

---

<sup>16</sup>Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 1998), hlm. 9.

kejadian politik, perang, diplomasi, dan tindakan tokoh-tokoh politik.<sup>17</sup> Dalam kenyataannya, keputusan dan kebijakan politik dalam sebuah negara sangat dipengaruhi oleh ideologi penguasa.<sup>18</sup> Menurut Panel Pall, ideologi didefinisikan sebagai suatu sistem serba inklusif yang mencakup realitas komperhensif, hal tersebut adalah rangkaian yang penuh semangat dan bertekad mengubah cara hidup secara menyeluruh.<sup>19</sup>

Berkenaan dengan ini, pada masa kepemimpinan Prawoto, Masyumi tidak mendukung pemerintahan Soekarno dan mengambil sikap sebagai oposisi. Sikap itu diambil dikarenakan Soekarno melibatkan PKI di berbagai institusi pemerintahan. Masyumi tidak menghendaki “campur tangan” PKI di Indonesia karena perbedaan ideologi dan trauma sejarah akibat peristiwa pemberontakan Madiun 1948 yang memakan korban kurang lebih 8000 orang.<sup>20</sup>

Penelitian ini menggunakan teori *challenge and response* (tantangan dan tanggapan) yang dikemukakan oleh Arnold Toynbee. Teori ini mengemukakan bahwa kebangkitan dan kemunduran peradaban suatu bangsa memiliki hubungan korelasional antara satu dan lainnya, yaitu tantangan dan tanggapan. Dalam hal ini jika kehidupan individu atau kelompok mampu merespon tantangan-tanggapan kehidupan dan menyesuaikan diri atau mengendalikan tantangan, maka individu atau kelompok tersebut akan mengalami perkembangan dan kemajuan. Akan tetapi jika individu atau kelompok tidak memiliki kemampuan merespon

---

<sup>17</sup>Dudung Abdurrahman, *Metodologi Penelitian Sejarah* (Yogyakarta: Ombak, 2011), hlm. 18.

<sup>18</sup>Deden Faturahman, *Pengantar Ilmu Politik* (Malang: UMM Press, 2002), hlm. 44.

<sup>19</sup>M. Amin Rais, *Cakrawala Islam Ilmu Antara Cinta dan Fakta* (Bandung: Mizzan, 1991), hlm 188.

<sup>20</sup>Riclefs, *Sejarah Indonesia Modern*, hlm. 346.

(mengendalikan) tantangan, maka individu atau kelompok ini akan mengalami kemunduran bahkan mengalami kehancuran.<sup>21</sup>

Latar belakang teori ini diidentifikasi dari gambaran perkembangan masyarakat. Pada masa *renaissance* masyarakat Barat dianggap sebagai contoh kehidupan yang berhasil mengendalikan tantangan. Akan tetapi hal yang tidak dapat dielakkan dari kenyataan ialah pada saatnya nanti masyarakat Barat akan mengalami kemunduran sebagaimana perjalanan masyarakat Yunani, Majapahit, Mesir Kuno, Romawi yang tidak berhasil mengendalikan tantangan dan akhirnya mengalami kehancuran.<sup>22</sup>

Sejarah mencatat Soekarno dan Prawoto sama-sama berstatus sebagai politikus ulung dengan posisi yang berbeda. Soekarno adalah wakil dari kaum nasionalis dan marxisme, sedangkan Prawoto bersama partainya (Masyumi) muncul sebagai pihak oposisi. Karena perbedaan cara pandang mengenai tata kelola negara, mereka di hadapkan oleh perselisihan. Akibat perselisihan tersebut munculah kebijakan yang diambil Soekarno untuk menjatuhkan pihak oposisi, yaitu Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Keputusan tersebut diambil Soekarno dengan alasan pertarungan ideologi antara pihak Islam dan Pancasila dalam menentukan dasar negara tidak dapat mencapai kata kompromi.

Dampak dari Dekrit tersebut Soekarno memegang penuh kendali pemerintahan Indonesia, sedangkan Prawoto dan Masyumi dipaksa keluar dari

---

<sup>21</sup>Elly Setiadi dan Usman Kolip, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), hlm. 619-620.

<sup>22</sup>*Ibid.*

pemerintahan dengan penetapan kabinet Gotong Royong. Dekrit tersebut ditentang keras oleh Prawoto dan partainya. Akan tetapi situasi tersebut tidak dapat dikendalikan oleh Prawoto dan partainya dikarenakan Soekarno memegang penuh lembaga pemerintahan dan konsentrasi tokoh partai-pun terbelah menjadi dua, antara pusat serta yang berpartisipasi di PRRI. Akhirnya Masyumi dihancurkan dengan surat perintah pembubaran oleh presiden Soekarno, tokoh-tokoh besar Masyumi (termasuk Prawoto) ditangkap dan dipenjara.

Sejalan dengan pemilihan teori tersebut, menurut Dilthey tugas sejarah adalah untuk menangkap sistem interaksi antara kedalaman alam insan dan konteks universal dari kehidupan sejarah yang luas. Interaksi merupakan hubungan fundamental antara hidup itu sendiri dengan sejarah dan inilah yang memberi pengaruh kepada setiap peristiwa sejarah.<sup>23</sup> Artinya seorang peneliti diharapkan untuk mengetahui dan merekam kejadian atau situasi yang mengitari kehidupan seorang tokoh dan harus menangkap serta menguraikan jalan hidup dengan lingkungannya sosial historis yang mengelilinginya. Dalam konteks ini bahwa seseorang seharusnya dilihat sebagaimana ia sesungguhnya berkembang bukan sebagaimana masyarakat ingin melihatnya.<sup>24</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam pencarian data, penelitian menggunakan kajian pustaka. Metode yang digunakan dalam penelitian

---

<sup>23</sup>Taufik Abdulah dkk, *Manusia Dalam Kemelut Sejarah* (Jakarta : LP3ES,1978), hlm. 4.

<sup>24</sup>*Ibid.*, hlm. 6.

ini adalah metode penelitian sejarah. Metode penelitian sejarah menurut Kuntowijoyo adalah petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang bahan, kritik, interpretasi, dan penyajian sejarah. Dalam metode penelitian ini ada empat tahapan, yaitu: pengumpulan data (Heuristik), pengujian sumber (Verifikasi), analisis data (Interpretasi), dan penulisan sejarah (Historiografi).<sup>25</sup>

### 1. Heuristik

Heuristik berasal dari kata Yunani *heurishein*, yang berarti memperoleh. Upaya pengumpulan data sejarah yang merupakan jejak masa lampau dalam penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka. Sumber-sumber yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber sekunder berupa buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah. Sumber sekunder diperoleh dari bazar buku Kompas Yogyakarta, toko buku Taman Pintar Yogyakarta, dan perpustakaan UIN Sunan Kalijaga. Selain itu sumber juga didapat dari internet. Penulis mendapat sumber sekunder pertama kali di bazar buku Kompas Yogyakarta yang berjudul *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. Kemudian penulis menemukan buku yang berjudul *Partai Masyumi, antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* karya Remy Madinier di toko buku Taman Pintar Yogyakarta. Di perpustakaan UIN Sunan Kalijaga penulis menemukan beberapa buku yang sesuai dengan penelitian penulis, seperti buku Buya Syafii Maarif, Deliar Noer, dan Muhammad Amin Rais. Selain buku, penulis melacak sumber dengan internet menggunakan situs Historia.id dan Google Play Book.

---

<sup>25</sup>Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Yatasan Bentang Budaya, 2001), hlm. 73-82.

## 2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan untuk memperoleh keabsahan sumber. Dalam ini yang harus diuji adalah keabsahan tentang keaslian sumber yang digunakan melalui kritik eksternal dan keabsahan tentang kesahihan sumber yang ditelusuri melalui kritik internal.<sup>26</sup> Hasil seleksi data baik segi bentuk maupun isi dari berbagai sumber yang dipilih oleh penulis hampir semuanya akurat, kecuali yang terdapat di buku *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan, Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, dan Ahmad Subarjo* yang ditulis oleh Zulfikar Ghazali dkk, dan diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta, 1998. Ada salah satu hal pokok di buku ini yang berbeda informasinya dengan sumber lain mengenai pembahasan Masyumi. Buku ini memaparkan bahwa Prawoto Mangkusasmito dengan sepenuh hati sepakat terhadap keputusan Soekarno mengenai Pancasila dan UUD 1945 menggantikan UUDS 1950 sebagai dasar negara Republik Indonesia. Sedangkan mayoritas sumber yang membahas tentang Masyumi mengandung hal yang sebaliknya, yaitu Prawoto terpaksa sepakat karena konstituante dibubarkan oleh Soekarno.

## 3. Interpretasi

Interpretasi merupakan tahap penafsiran data yang telah menjadi fakta, dengan cara analisis (menguraikan) dan sintesis (menggabungkan) fakta yang relevan. Bersama dengan teori disusunlah ke dalam suatu interpretasi yang menyeluruh.<sup>27</sup> Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran mendalam sesuai kemampuan peneliti terhadap data yang telah didapatkan agar informasi yang

---

<sup>26</sup>Dudung, *Metodologi Penelitian*, hlm. 108.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 69.

dihasilkan dalam penelitian berimbang. Memadukan data yang berasal dari buku, jurnal, dan artikel yang berhubungan dengan tema yang di tulis. Dari sekian buku yang bertema Masyumi atau Soekarno tidak semua buku membahas mengenai sikap Prawoto atas kebijakan politik Soekarno. Oleh karena itu penulis mengambil sumber-sumber yang memiliki keterkaitan. Data dianalisis dengan menggabungkan kalimat suatu buku dengan buku lain, sehingga membentuk paragraf yang dapat dipahami. Penulis menganalisis data yang ditemukan dengan menggunakan pendekatan politik yang didukung oleh teori *challenge and response*.

#### 4. Historiografi

Pada tahap ini dilakukan penggabungan data untuk kemudian disajikan dalam bentuk tulisan yang memberikan penjelasan mengenai dinamika sejarah sikap politik bersebrangan antara Prawoto dan Soekarno perihal Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran Masyumi.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Hasil penelitian disajikan dalam bentuk tulisan yang disusun dan dikelompokkan ke dalam beberapa bab. Pembahasan mulai dari bab pertama hingga bab empat dibuat secara runtut dan saling terkait satu sama lain. Bab I merupakan pendahuluan yang membahas berbagai rencana penelitian, meliputi latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, landasan teori, metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Dari pendahuluan ini terlihat alasan-alasan peneliti

tertarik untuk membahas tentang sikap Prawoto Mangkusasmito atas kebijakan politik Soekarno.

Perencanaan penelitian pada bab I mulai dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya. Pembahasan dimulai dari bab II yang memaparkan biografi Prawoto Mangkusasmito. Pembahasan ini mencakup riwayat hidup Prawoto Mangkusasmito yang terdiri dari latar belakang keluarga, pendidikan, dan kiprah politiknya di Indonesia. Pembahasan dalam bab II ini mengantarkan pada pembahasan bab selanjutnya terkait kebijakan politik Soekarno.

Setelah membahas biografi Prawoto Mangkusasmito, maka pada bab III ini dibahas terkait tinjauan tentang dua kebijakan politik besar yang diambil Serkarno. Kebijakan tersebut adalah keluarnya perintah untuk melaksanakan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan pembubaran partai Masyumi.

Setelah tinjauan tentang dua kebijakan politik besar yang diambil Serkarno dipaparkan pada bab sebelumnya, maka pada bab IV ini peneliti membahas sikap yang diambil Prawoto Mangkusasmito mengenai kebijakan politik yang diambil oleh Soekarno. Pembahasan ini meliputi sebab-akibat sikap yang diambil Prawoto terhadap kebijakan Soekarno mengenai Dekrit Presiden 1959 serta pembubaran partai Masyumi.

Bab V berupa penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan mendeskripsikan jawaban dari berbagai permasalahan yang diajukan dalam penelitian. Sedangkan saran untuk memberikan masukan kepada berbagai pihak guna menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan dalam penelitian selanjutnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Prawoto Mangkusasmito yang lahir di Magelang pada 4 Januari 1910 pernah menjabat berbagai posisi penting, dengan jabatan termasyhur sebagai Wakil Perdana Menteri dan Ketua Umum Masyumi. Pemikirannya dibentuk ketika menjadi anggota *Jong Java* dan *Jong Islamieten Bond* yang kemudian memupuk keahliannya dalam berorganisasi dan berpolitik dengan semangat cita-cita akan sebuah nasionalisme Indonesia berdasarkan Islam.

Kurun waktu 1957-1962 ada dua kebijakan besar dalam negeri yang diambil Soekarno dan mendapat respon dari Prawoto Mangkusasmito. Pertama adalah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang merupakan langkah utama Soekarno untuk memulai model Demokrasi Terpimpin. Kedua adalah Keputusan Presiden No. 200/1960 tanggal 17 Agustus 1960 tentang pembubaran partai Masyumi pada tahun 1960, yaitu partai yang sedang diketuai Prawoto.

Prawoto mengambil sikap bersebrangan atas apa yang diputuskan oleh Soekarno. Menurut Prawoto dampak dari sistem Demokrasi Terpimpin adalah memunculkan status “maha pemimpin” dan menempatkan pemimpin itu di atas hukum, dengan sentralisasi (pemusatan kekuasaan di tangan presiden) yang berujung pada *mach-staat* (negara kekuasaan). Mengenai Keputusan Presiden No. 200/1960, Prawoto sebagai ketua memutuskan untuk membubarkan Masyumi,

dengan tetap berusaha memperjuangkan hak-hak Masyumi melalui jalur hukum. Sikap ini diambil untuk menghindari status Masyumi sebagai partai terlarang. Pada tanggal 16 Januari 1962 Prawoto dijebloskan ke dalam tahanan tanpa melalui proses hukum dan pengadilan. Prawoto ditempatkan di Rumah Tahanan Militer Madiun, dan terakhir di Wisma Keagungan Jakarta bersama-sama dengan Natsir, Syafruddin Prawiranegara, Buya Hamka, dan Burhanuddin Harahap.

## **B. SARAN**

Penulis menyadari bahwa karya ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menyampaikan beberapa saran-saran bagi peneliti setema yang akan datang sebagai berikut:

1. Perlu adanya pembahasan lebih lanjut mengenai keterlibatan Prawoto di zaman perjuangan dan pasca kemerdekaan Indonesia agar memperkaya informasi salah satu tokoh pendiri bangsa ini.
2. Setelah membaca perjalanan Masyumi dalam memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia (khususnya dalam menghadapi ideologi sekuler), baiknya wajib menjadi pelajaran bagi umat Islam zaman ini. Memperjuangkan Islam bisa dilakukan dalam banyak aspek, salah satunya melalui politik parlemen yang selama ini dianggap kotor.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdulah, Taufik dkk.. *Manusia Dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1978.
- Abdurrahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta: Ombak, 2011.
- Artawijaya. *Belajar dari Partai Masjumi*. Jakarta: PT. Al-Kautsar, 2014.
- Bajasut, Saleh Umar. *Alam Pikiran dan Jejak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara, 2014.
- Budiardjo, Miriam. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1998.
- Dhakidaje, Daniel. *Manusia dalam Kemelut Sejarah*. Jakarta: LP3ES, 1981.
- Faturahman, Deden. *Pengantar Ilmu Politik*. Malang: UMM Press, 2002.
- Ghazali, Zulfikar, dkk.. *Tokoh Pemikir Paham Kebangsaan: Prawoto Mangkusasmito, Wilopo, Ahmad Subarjo*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1998
- Hamka, Rusydi. *Pribadi dan Martabat Buya Hamka*. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1983.
- Hakiem, Lukman. *Enam Puluh Tahun YPI Al-Azhar 7 April 1952-7 April 2012*. Jakarta: Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, 2012.
- Isaniwati, Nur. *Mohamad Roem, karier politik dan perjuangannya, 1924-1968*. Magelang: Indonesiatra, 2002.

Kuntowijoyo. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Yatasan Bentang Budaya, 2001.

Latif, Yudi. *Inteligensia Muslim dan Kuasa: Genealogi Inteligensia Muslim Indonesia Abad ke-20*. Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2005.

Leirissa, *PRRI Permesta*. Jakarta: PT. Anem Kosong Anem, 1997.

Lesmana, Tjipta. *Dari Soekarno Sampai SBY, Intrik Dan Lobi Politik Para Penguasa*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Maarif, Ahmad Syafi'i. *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*. Yogyakarta: Pustaka Parama Abiwara, 1988.

\_\_\_\_\_, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*. Bandung: Mizan, 2017.

Madinier, Remy. *Partai Masjumi, Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Mizan, 2013.

Matroji. *Sejarah*. Jakarta: Erlangga, 2002.

Noer, Deliar. *Mohammad Hatta Biografi Politik*. Jakarta: LP3S, 1990.

\_\_\_\_\_. *Partai Islam di Pentas Nasional 1945-1965*. Jakarta: Grafiti Pers, 1987.

Rais, Muhammad Amin. *Cakrawala Islam Ilmu Antara Cinta dan Fakta*. Bandung: Mizan, 1991.

\_\_\_\_\_. *Demokorasi dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES, 1986.

Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005.

- Roem, Mohamad. *Pelajaran Dari Sejarah*. Surabaya: Documenta, 1970.
- Rosidi, Ajib. *Sjafruddin Prawiranegara Lebih Takut Kepada Allah Swt*. Jakarta: Pustaka Jaya, 2011.
- Rosyada, Dede, dkk.. *Pendidikan Kewargaan (Civic Education) Demokrasi, Hak Asasi Manusia & Masyarakat Madani*. Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kerjasama The Asia Foundation & Perdana Media, 2003.
- Samsuri, *Politik Islam Anti Komunis*. Yogyakarta: Safinia Insania Press, 2014.
- Setiadi, Elly dan Usman Kolip. *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi, dan Pemecahannya*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011.
- Simatupang. *Laporan dari Banaran Kisah Pengalaman Seorang Prajurit Selama Perang Kemerdekaan*. Jakarta: PT. Pembangunan, 1961.
- Siregar, Insan Fahmi. *Partai Masyumi dalam Dinamika Demokrasi Indonesia*. Semarang: Widya Karya, 2012.
- Soekarno, *Di Bawah Bendera Revolusi*. Jakarta: Panitia Penerbit Di Bawah Bendera Revolusi, 1964.
- Soerojo, Soegiarso. *Siapa Menabur Angin Akan Menuai Badai, G30S-PKI dan Peran Bung Karno*. Jakarta: PT. Intermasa, 1988.
- Sumarsono, Sumarso. *Pengalaman dari Tiga Penjara*. Jakarta: Yayasan Bunga Revolusi, 1971.
- Suryanegara, Ahmad Mansur. *Api Sejarah II*. Bandung: PT Grafindo Media Pratama, 2010.
- Tunggal, Wawan. *Demokrasi Terpimpin Milik Rakyat Indonesia, Kumpulan Pidato Soekarno*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001.

### Karya Ilmiah

Mubarak, Zaki. “Demokrasi dan Kediktatoran: Sketsa Pasang Surut Demokrasi di Indonesia”, *Jurnal Politika: Jurnal Pencerahan Politik Untuk Demokrasi*, Volume 3, no. 3, Desember 2007.

Abdurrahman. “Jong Islamiyeten Bond 1925-1942, Sejarah, Pemikiran, dan Gerakan”, *Desertasi Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1999. Tidak dipublikasikan.



**DAFTAR RIWAYAT HIDUP****A. Identitas Diri**

Nama : Fitra Fadhli Prilana  
Tempat dan Tanggal Lahir : Jambi, 07 April 1994  
Nama Ayah : Tuhirin  
Nama Ibu : Efi Pristiani  
Asal Sekolah : SMAN 8 Kota Jambi  
Alamat Asal : Mayang Mangurai, Kota Jambi  
Alamat Jogja : Gendeng, Timoho, Kota Yogyakarta  
Alamat email : [fitrakokis@gmail.com](mailto:fitrakokis@gmail.com)  
No. HP : 0896-6904-7289

**B. Riwayat Pendidikan**

- SDN 145 Kota Jambi, lulus tahun 2006
- SMPN 24 Kota Jambi, lulus tahun 2009
- SMAN 8 Kota Jambi, lulus tahun 2012
- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, lulus tahun 2018

Yogyakarta, 31 Januari 2018  
Saya yang menyatakan,

**Fitra Fadhli Prilana**  
**NIM : 12120007**